



**Kementerian PPN/  
Bappenas**



# **SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Oleh:

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan

Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) Perspektif Stakeholder terhadap Undang-Undang  
Nomor 25 Tahun 2004

Jakarta, 5 Juni 2013

**1**

**Analisis Situasional:  
Kondisi Perencanaan dan Penganggaran**

**2**

**Tantangan:  
Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran**

**3**

**Inisiatif Sinergitas:  
Mengoptimalkan Hasil Pembangunan**

**4**

**Tindak Lanjut:  
Membangun Komitmen bersama K/L**

**1**

## **Analisis Situasional: Kondisi Perencanaan dan Penganggaran**

## 1.1 Fakta-Fakta

Hasil kajian menemukan adanya **keterlepas-kaitan antara proses perencanaan dan penganggaran**, hal ini menyebabkan kurang optimalnya efektivitas hasil pembangunan nasional. Kondisi ini dapat ditengarai dengan adanya:

“**Terputusnya rantai proses**” antara perencanaan (Bappenas: Januari-Mei) dan penganggaran (Kemen. Keuangan: Juni-Desember), sehingga terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran

Ilustrasi inkonsistensi: terdapat **29,4% indikator kinerja** prioritas RKP 2012 tidak terpetakan dalam RKA K/L tahun 2012;

**Ketidakselarasan antara siklus perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah**, hal ini menyulitkan tercapainya sinergi pembangunan lintas sektor, antarruang, antarwaktu, maupun antara pusat dan daerah

**Ketidakharmenisan peraturan perundang-undangan** yang mengatur (terkait dengan) perencanaan dan penganggaran, antara lain: UU No 17/2003, UU No. 25/2004, UU 32, 33/2004, dan UU 27 Tahun 2009



## 1.2 Hasil Kajian Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran

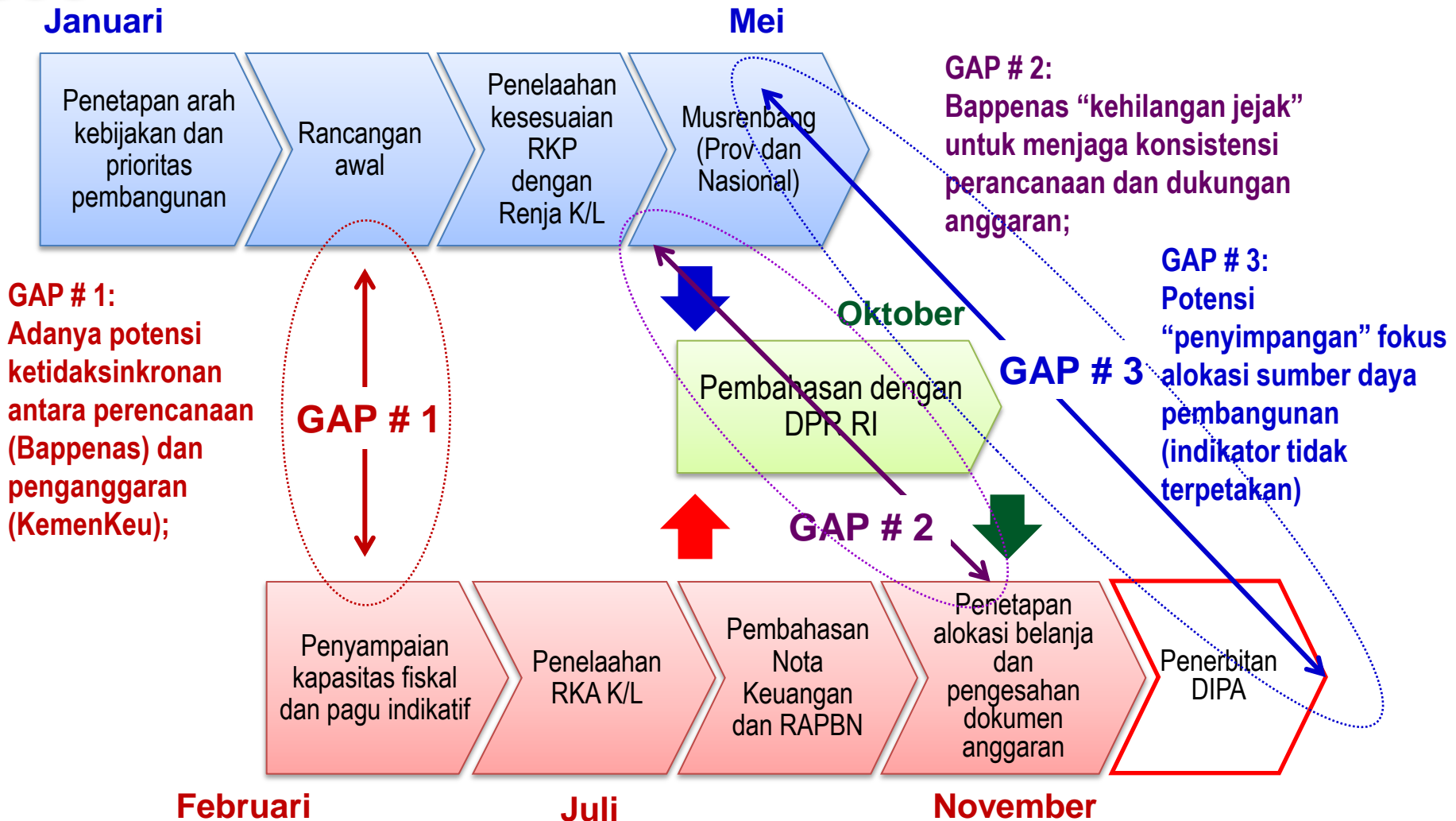
### TUJUAN SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- ❑ Key element : Kepastian dukungan anggaran pembangunan bagi pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang bersifat wajib untuk dilaksanakan;
- ❑ Driver power : Pencapaian penggunaan anggaran (penyerapan) yang tinggi dengan tingkat efektivitas yang fokus pada tujuan pembangunan.

### KONDISI UNTUK MENCAPAI SINERGITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- ❑ Key element : Adanya peraturan dan perundangan yang selaras dan atau mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan;
- ❑ Driver power: Keselarasan yang integratif antara siklus perencanaan pusat dan daerah.

## 1.2 Deviasi Antara Perencanaan dan Penganggaran



**2**

## **Tantangan: Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran**

## 2.1 SINERGITAS : Tantangan dan Harapan

### Tantangan Saat Ini

1. Kurangnya transparansi dalam proses formulasi anggaran;
2. Ketidakjelasan hubungan antara perencanaan kebijakan dan anggaran;
3. Proses politik dalam perencanaan pembangunan dan formulasi kebijakan anggaran;
4. Keterbatasan informasi berkaitan dengan :
  - a. Kinerja pemerintah dalam kebijakan anggaran;
  - b. Akuntabilitas pengeluaran pemerintah;
  - c. Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran;
5. Belanja K/L kurang berkualitas dan tidak terkontrol;



### Harapan Pencapaian

1. Perlunya perbaikan pada proses pengambilan Keputusan dalam alokasi sumber daya (*optimum allocation*):
  - a. Menumbuhkan kompetisi dalam pendanaan kebijakan
  - b. Transparansi dan Akuntabilitas yang lebih baik dalam alokasi pendanaan
2. Perlu adanya kebijakan anggaran yang kredibel dan berkelanjutan (*sustainable & credible budget*) yang akan menentukan kinerja optimal ekonomi nasional.
3. Perlu adanya informasi kinerja dalam kebijakan anggaran untuk mengontrol jalannya pembangunan

Catatan: Faktor-faktor di atas selaras dengan riset dilakukan oleh Blondal, JR, Hawkeswothdan, and H-D Choi (2009) atas "Sistem Penganggaran di Indonesia", serta dipertegas kajian Lembaga Transparansi Anggaran/FITRA (2012) terkait "Disintegrasi antara sistem informasi rencana, anggaran dan realisasi".



## 2.2 Prasyarat Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran

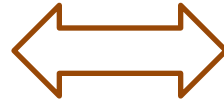


**3**

## **Inisiatif Sinergitas: Mengoptimalkan Hasil Pembangunan**

## 3.1 Inisiatif Dalam Proses Politik

**Proses Politik**



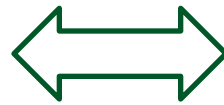
**Legitimasi dan  
Dukungan Politik**

### **Inisiatif yang Harus Dilaksanakan :**

1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan;
2. Penataan mekanisme dan lingkup bahasan perencanaan dan penganggaran;
3. Penyelarasan siklus perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah;
4. *High level round-table discussion*

## 3.2 Inisiatif Dalam Partisipasi Publik

**Partisipasi Publik**



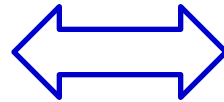
**Akseptansi dan  
Dukungan Publik**

### **Inisiatif yang Harus Dilaksanakan :**

1. Persepsi positif atas langkah strategis sinergitas perencanaan dan penganggaran;
2. Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta
3. Pemantauan proses dan hasil pelaksanaan pembangunan;
4. Forum konsultasi publik (OMS, PT, Asosiasi);

### 3.3 Inisiatif Dalam Penataan Birokrasi

**Penataan  
Birokrasi**

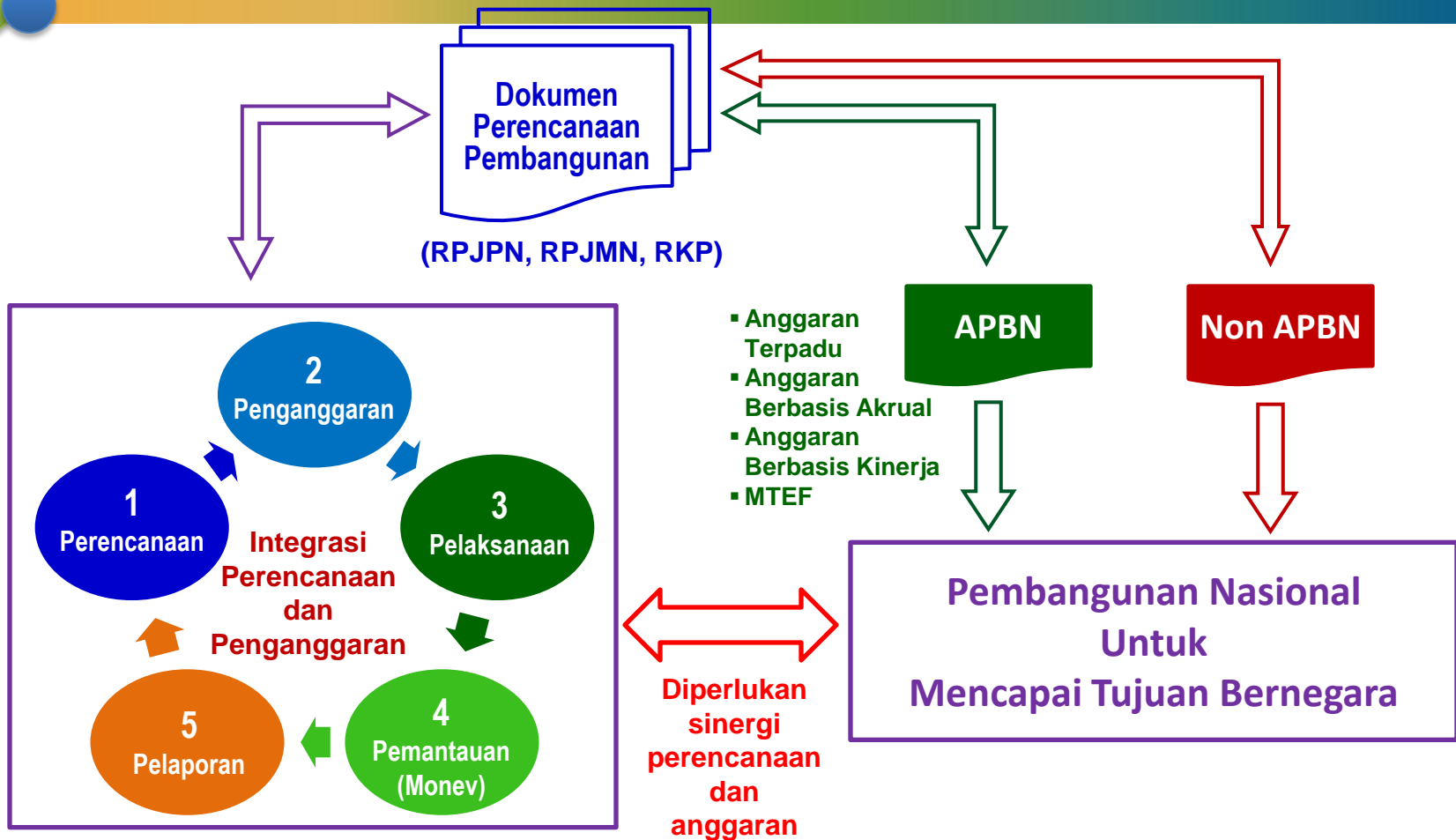


**Integrasi dan  
Keberlanjutan  
Pembangunan**

#### Inisiatif yang Harus Dilaksanakan :

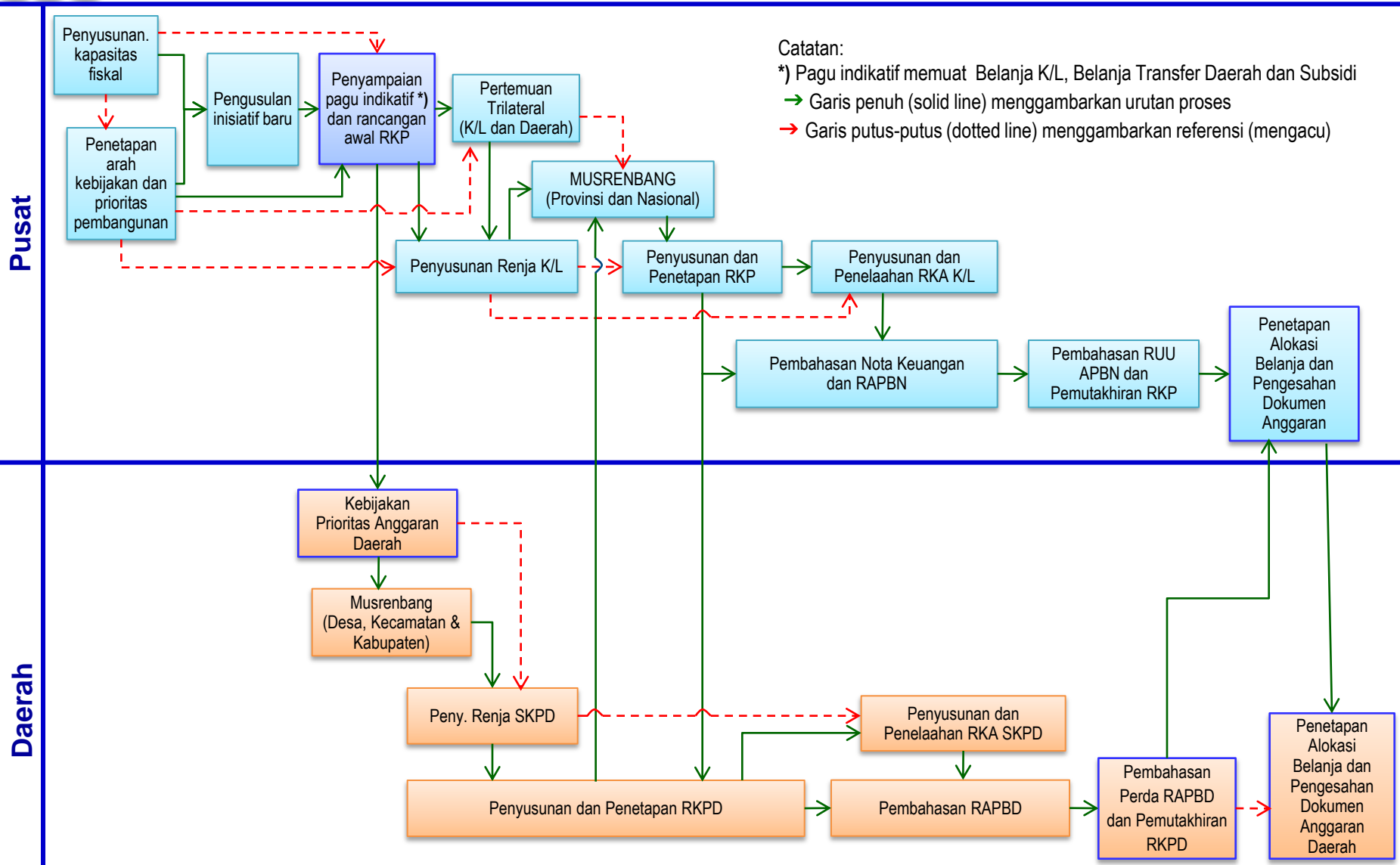
1. **Tingkat direktif:** pembahasan kabinet, untuk menjaga fokus dan optimalisasi sumberdaya pembangunan melalui koordinasi program dan sinergi anggaran;
2. **Tingkat strategik:**
  - a. Koordinasi Kemen. Keuangan, Kemen PPN/Bappenas, dalam perencanaan dan penganggaran;
  - b. Koordinasi Kemen. PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemen Dalam Negeri, dalam sinkronisasi siklus perencanaan dan penganggaran;
  - c. Koordinasi PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemen Kemen Koordinasi, dalam skenario sinergi pembangunan oleh lintas K/L dan Daerah
3. **Tingkat taktikal:**
  - a. Koordinasi lintas K/L/D dalam pelaksanaan prioritas pembangunan nasional;
  - b. Restrukturisasi organisasi K/L strategik agar *link & match* dalam sinergitas perencanaan dan penganggaran
4. **Tingkat operasional:**
  - a. Penguatan kapasitas fungsi/lembaga perencana K/L/D;
  - b. Deployment JF Perencana pada K/L/D;

### 3.4. Sistem Manajemen Pembangunan yang Terintegrasi



APBN sebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi APBN diperlukan sinergi antara perencanaan dan penganggaran.

## 3.5. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran (Pusat & Daerah)



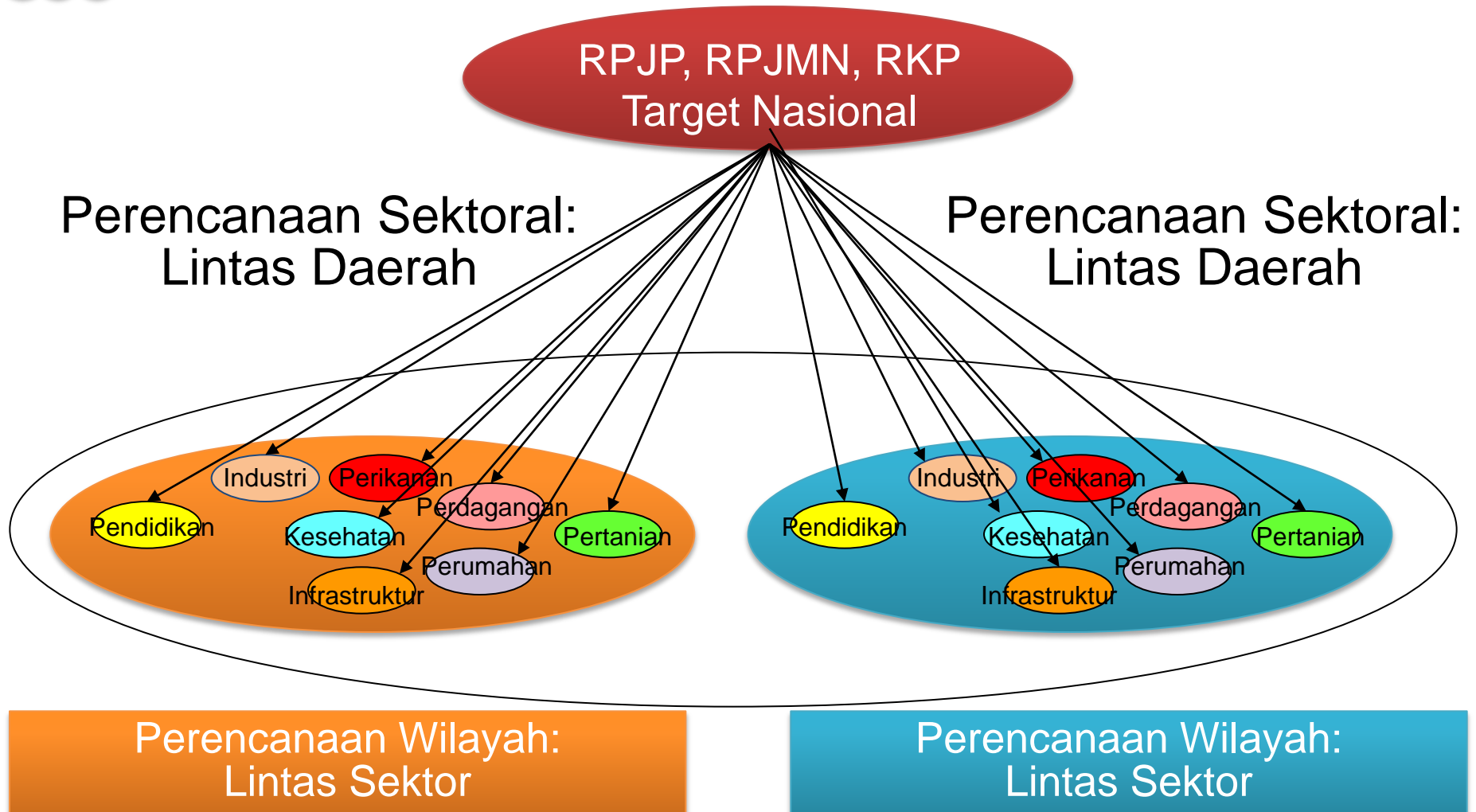
**4**

**Tindak Lanjut:  
Membangun Komitmen bersama K/L**

## 4.1 Lingkup Perencanaan dan Penganggaran Untuk Pembangunan

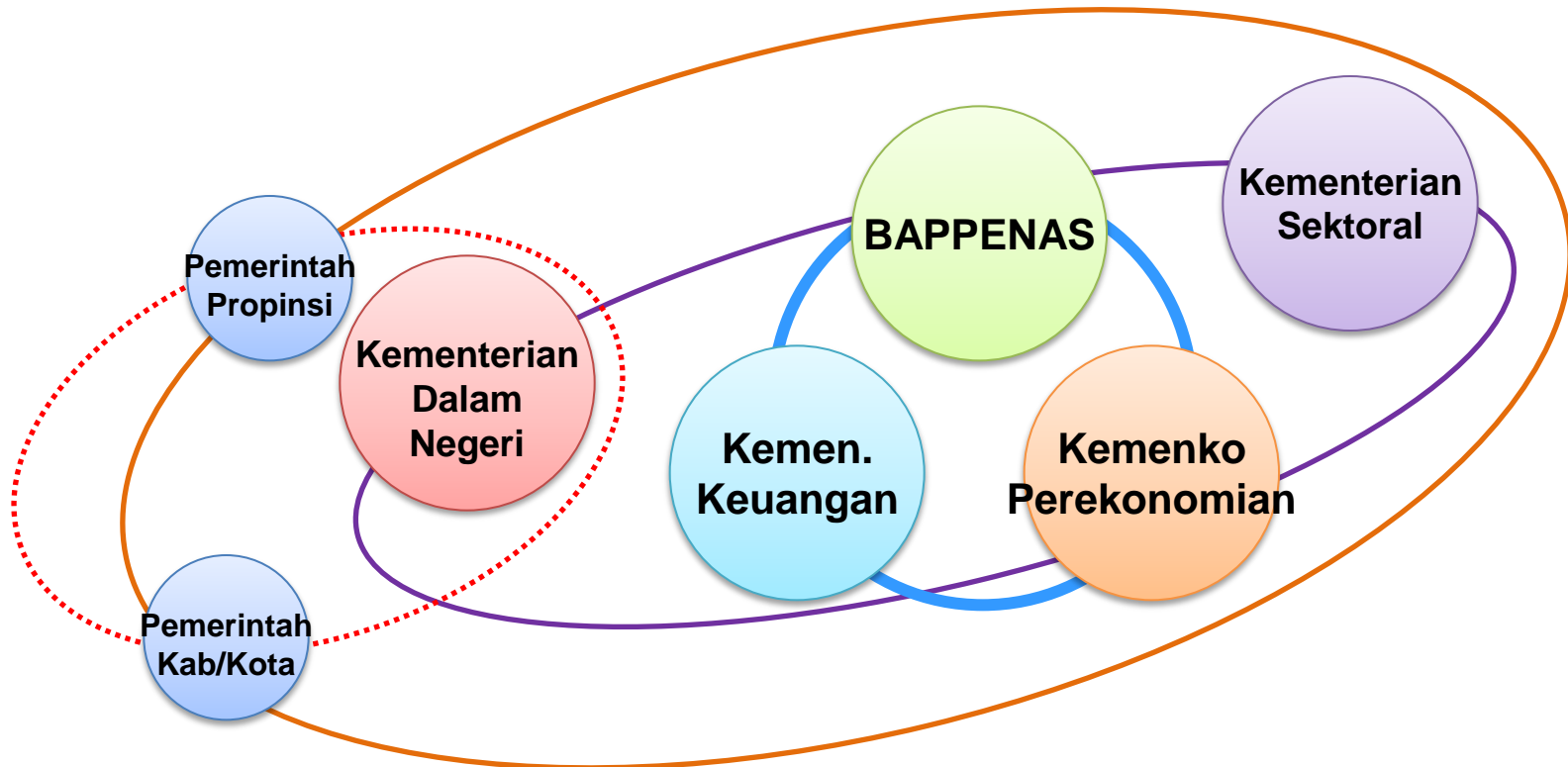


## 4.2 Muatan Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran



### 4.3 Koordinasi Inter-Organisasi pada Tingkat Direktif dan Strategik

- Penguatan instrumen perencanaan pembangunan melalui **koordinasi pada tingkat direktif (tingkat tinggi)** antara Kemen PPN/Bappenas, Kemen Keu, dan Kemenko Perekonomian;
- Koordinasi tingkat strategik (lintas K/L/D untuk membangun **integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik** antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah **maupun** antara pusat dan daerah



#### 4.4 Masukan untuk Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Kedepan Seperti apa?

1. **Keinginan untuk membangun kesepahaman** Kemen. Keu. dan Kemen. PPN/Bappenas untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran → bentuknya seperti apa? Masukan K/L sangat diperlukan.
2. **Koordinasi 3 Kementerian:** Kemen. Keuangan – Kemen. PPN/Bappenas, dan Kemen. Dalam Negeri, untuk mengintegrasikan siklus perencanaan pusat dan daerah → Usulan perwujudannya?
3. **Koordinasi Kementerian/ Lembaga dengan Kemen. Keuangan – Kemen. PPN/Bappenas, dan Kemen. Dalam Negeri seperti apa?**
4. **Apakah perlu birokrasi ditata?** Penataan birokrasi (struktur, postur dan budaya kerja) Kementerian/ Lembaga yang selaras dengan reformasi perencanaan dan penganggaran.



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**Terima Kasih**